

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil analisis *Location Quotient (LQ)* untuk 17 sektor dan 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat pada tahun analisis 2016-2020 diperoleh hasil baik sektor basis maupun sektor non basis. Hasil tersebut menunjukkan Provinsi Sumatera Barat menghasilkan sektor basis atau potensial terbanyak berada di sektor Konstruksi yaitu terdapat di 12 daerah antara lain, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Kemudian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dihasilkan oleh 11 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, antara lain Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian sektor yang paling sedikit menghasilkan sektor basis yaitu sektor Pengadaan listrik dan gas terdapat di Kota Sawah Lunto dan Kota Bukittinggi, kemudian sektor jasa perusahaan yang terdapat di Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Hasil MRP setelah di *overlay* menunjukkan hasil bahwa beberapa kabupaten/kota terdapat keunggulan atau daya saing kompetitif maupun komparatif terhadap masing-masing sektornya. Secara keseluruhan hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor konstruksi merupakan sektor yang mempunyai keunggulan atau daya saing kompetitif dan komparatif terbanyak yang dihasilkan pada masing-masing daerah di Provinsi Sumatera Barat, daerah tersebut antara lain, Kabupaten Sawah Lunto, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Kota Sawah Lunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Kemudian Kota Padang merupakan penghasil sektor yang

mempunyai keunggulan atau daya saing kompetitif dan komparatif terbanyak yaitu pada sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor jasa lainnya.

Hasil analisis *Shift-share* di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki keunggulan Kompetitif maupun spesialisasi terhadap sektornya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang merupakan sektor paling unggul penghasil daya saing kompetitif dan spesialisasi, sektor tersebut dihasilkan oleh Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Solok, Sawah Lunto, dan Kota Bukittinggi. Dari keunggulan kompetitif dan spesialisasi yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, ada yang dimiliki keduanya sekaligus. Artinya sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif sekaligus spesialisasi di daerah tersebut. Namun tidak semua seperti itu, hanya beberapa sektor tertentu dan daerah tertentu. Tidak semua sektor basis di kabupaten/kota mempunyai spesialisasi. Demikian sebaliknya tidak semua yang masuk kriteria spesialisasi belum tentu sebagai sektor basis.

Hasil analisis tipologi *klassen* menunjukkan bahwa daerah yang masuk kedalam klasifikasi Daerah cepat maju dan tumbuh cepat (kuadran I), adalah Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Daerah yang masuk kedalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan (kuadran II), adalah Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman. Daerah yang masuk kedalam klasifikasi daerah berkembang cepat (kuadran III), adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Dharmasraya. Daerah yang masuk kedalam klasifikasi daerah relatif tertinggal (kuadran IV) adalah Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil perhitungan tiga alat analisis yaitu analisis LQ, MRP, dan *Shift share* kemudian di ranking untuk menentukan sektor prioritas, maka dapat

disimpulkan bahwa sektor yang tergolong dalam prioritas sektor pertama yaitu, prioritas pertama untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah kabupaten Mentawai. Prioritas pertama untuk sektor pertambangan dan penggalian adalah kabupaten Sijunjung. Prioritas pertama untuk sektor Industri Pengolahan di kabupaten Agam. Prioritas pertama untuk sektor Pengadaan Listrik dan Gas di kota Sawah Lunto. Prioritas pertama untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang adalah Kota Sawah. Prioritas pertama untuk sektor Konstruksi, terdapat di 4 kabupaten/kota, yaitu kabupaten Mentawai, kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Sijunjung, dan kota Padang. Prioritas pertama untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran adalah kota Padang. Prioritas pertama untuk sektor Transportasi dan Pergudangan adalah kota Padang, kota Solok, dan kota Padang Panjang. Prioritas pertama untuk sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah kota Pariaman. Prioritas pertama untuk sektor Informasi dan Komunikasi adalah kota Padang, kota Sawah Lunto, kota Payakumbuh, dan kota Pariaman. Prioritas pertama untuk sektor Jasa Keuangan dan Asuransi adalah kota Solok. Prioritas pertama untuk sektor *Real Estat* adalah kabupaten Dharmasraya dan kota Padang. Prioritas pertama untuk sektor Jasa Perusahaan adalah kota Padang. Prioritas pertama untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Tanah Datar, kabupaten Dharmasraya, kota Padang, dan kota Padang Panjang. Prioritas pertama untuk sektor Jasa Pendidikan adalah kota Padang Panjang, kabupaten Agam, kota Padang Panjang, dan kota Bukittinggi. Prioritas pertama untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial adalah kabupaten Sijunjung, kabupaten Lima Puluh Kota, dan kota Bukittinggi. Prioritas pertama untuk sektor Jasa Lainnya adalah kota Padang, kota Payakumbuh, kota Sawah Lunto, kota Padang Panjang, dan kota Pariaman.

6.2 Saran

1. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi non prioritas agar bisa bersaing dengan sektor-sektor ekonomi yang sama diluar daerah dan menciptakan perkembangan sektor-sektor perekonomian yang seimbang, maka pemerintah harus lebih mempercepat kerjasama yang baik dengan pihak swasta untuk

bersama-sama menggali sumber-sumber ekonomi di Kabupaten/Kota di setiap wilayah pengembangan pembangunan.

2. Perlunya mengenal lebih baik daerah-daerah khususya daerah yang berada pada kuadran IV yang masuk klasifikasi daerah relatif tertinggal yang mempunyai spesialisasi dan potensi ekonomi yang rendah, agar bijak dalam menentukan skala prioritas pembangunan, sehingga sektor-sektor tersebut dapat menunjang pembangunan dan dapat merubah posisi tipologi daerah ke yang lebih baik atau meminimalisir keberadaan kabupaten/kota pada daerah yang masuk kedalam klasifikasi daerah relatif tertinggal.
3. Bagi investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Sumatera Barat, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam memperhatikan sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan serta prioritas pembangunan pada masing-masing sektor di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.